

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan penjelasan ringkas mengenai profil kedua media daring yang digunakan dalam penelitian, yaitu Kompas.com dan Tempo.co. Sumber yang diambil untuk referensi ini diambil dari situs atau web dari kedua media tersebut.

4.1.1 Kompas.com



Gambar 4. 1 Logo Kompas.com
Sumber: *Linkedin*

Kompas merupakan sebuah media daring pertama yang berada di Indonesia, Kompas adalah media daring pertama di Indonesia. Kompas.com merupakan salah satu pelopor media online di Indonesia yang pertama kali muncul di Internet pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online. Pada awalnya, Kompas Online (KOL) yang dapat diakses melalui alamat kompas.co.id hanya menampilkan replika berita harian Kompas yang terbit pada hari itu. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan kepada para pembaca harian Kompas di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi. Dengan kehadiran Kompas Online, pembaca, terutama di Indonesia bagian timur dan di luar negeri, dapat menikmati berita harian Kompas tanpa harus menunggu beberapa hari (Kompas.com, n.d).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya jumlah pengguna Internet, pada awal tahun 1996, alamat Kompas Online berubah menjadi www.kompas.com. Perubahan ini membuat Kompas Online semakin terkenal di kalangan pembaca setia harian Kompas di luar negeri. Menyadari potensi besar di

dunia digital, Kompas Online kemudian dikembangkan menjadi unit bisnis tersendiri di bawah PT Kompas Cyber Media (KCM) pada 6 Agustus 1998. Di era ini, pengunjung KCM tidak hanya mendapatkan replika harian Kompas, tetapi juga pembaruan berita terbaru yang terjadi sepanjang hari (Kompas.com, n.d).

Pada 29 Mei 2008, portal berita ini melakukan rebranding menjadi Kompas.com, merujuk kembali pada merek Kompas yang dikenal dengan jurnalisme yang bermakna. Dengan penambahan kanal-kanal berita dan peningkatan produktivitas sajian berita, Kompas.com berkomitmen untuk memberikan informasi yang selalu terbaru dan aktual kepada para pembaca. Rebranding ini bertujuan untuk menegaskan posisi Kompas.com sebagai acuan bagi jurnalisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang sering kali tidak jelas kebenarannya (Kompas.com, n.d).

4.1.2 Tempo.co



Gambar 4. 2 Logo Tempo.co
Sumber: *Tempo.co*

Majalah Tempo didirikan pada tahun 1971 melalui perundingan enam wartawan ternama; Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah, dan Christianto Wibisono yang bekerja sama dengan Ciputra, pendiri Yayasan Jaya Raya. Diskusi pertama berlangsung di Proyek Senen dan berlanjut di kediaman Ciputra di Slipi, menghasilkan kesepakatan pembentukan majalah Tempo dengan modal awal dari yayasan tersebut (Tempo.co, n.d).

Nama "Tempo" dipilih karena beberapa alasan: singkat, mudah diucapkan, netral, tidak mengarah ke golongan tertentu, dan memiliki makna universal tentang "waktu" kosakata yang kerap digunakan dalam dunia jurnalistik global. Tempo memulai perjalanannya dengan edisi pengenalan pada Februari 1971 (tanpa tanggal, dengan cover "Tragedi Minarni dan Kongres PBSI"), diikuti edisi perdana pada 6 Maret 1971 yang mengangkat tajuk "Film Indonesia: Selamat Datang,

Sex." Awalnya, Tempo fokus pada seni, gaya hidup, dan kritik sosial dengan gaya penyajian yang segar (Tempo.co, n.d).

Pada 4 Februari 1974, struktur bisnis Tempo berubah ketika Yayasan Jaya Raya dan PT Pikatan (perusahaan milik karyawan) mendirikan PT Grafiti Pers dengan pembagian saham 50:50 langkah untuk memberi kepemilikan kepada pekerja. Tempo berkali-kali menghadapi tekanan politik. Pada 1982, pemerintah membredel Tempo pertama kali karena dianggap terlalu kritis terhadap Orde Baru dan Golkar menjelang Pemilu. Pembredelan kedua terjadi pada 21 Juni 1994 setelah Tempo mengkritik Habibie dan Soeharto terkait pembelian kapal bekas Jerman Timur (Tempo.co, n.d).

Setelah Soeharto jatuh pada 1998, mantan staf Tempo bermusyawarah dan memutuskan untuk menghidupkan kembali majalah ini. Pada 6 Oktober 1998, Tempo terbit kembali di bawah PT Arsa Raya Perdana. Untuk memperkuat ekspansi bisnis media, PT Arsa Raya Perdana melakukan go public pada 2001 dan berganti nama menjadi PT Tempo Inti Media Tbk. Langkah ini digunakan untuk mendanai penerbitan Koran Tempo, memperluas cakupan berita harian (Tempo.co, n.d).

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Artikel Berita Kompas.com

1. Analisis Media (Kompas.com)

a. Analisis Berita 1

Judul :Anggaran Kementerian PU Dipangkas 80 Persen, Wamen:
Proyek Infrastruktur Bakal Terdampak
Sumber :Kompas.com
Tanggal :Kamis, 31 Januari 2025
Ringkasan :Berita ini berisikan pemangkasan yang di lakukan
Kementerian Pekerja Umum sebesar 80 persen sebagai salah
satu kebijakan efisiensi APBN. Pemangkasan tersebut sangat
berdampak untuk infrastruktur negara.

Tabel 4. 1. Analisis Artikel Berita 1 Kompas.com

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Proyek infrastruktur akan terdampak akibat pemangkasan anggaran sebesar 80 persen
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemangkasan ini bisa terjadi akibat perintah yang di berikan oleh presiden dan di lanjutkan oleh kementerian keuangan yaitu penghematan anggaran belanja kementerian dan lembaga di hemat sebanyak Rp 110,95 triliun yang mengakibatkan anggaran kementerian PU hanya tersisa Rp 29,95 triliun
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Wakil menteri Dina Kusuma mengatakan bahwa pihaknya akan melihat proyek – proyek mana saja yang akan di priotritaskan untuk tetap di kerjakan dengan anggaran yang ada.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Kementerian Keuangan memerintahkan 16 pos anggaran belanja untuk di pangkas anggaranya.

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Kompas.com ini mendefinisakan masalah yang di hadapi oleh Kementerian Pekerja Umum terhadap pemangkasan yang sebesar 80 persen. Hal ini bisa lihat dari pemberitaan yang di tuliskan berfokus kepada efisiensi anggaran kementerian pekererja umum yang nominal angka pematonganya sangat besar.

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah ini adalah perinta yang di berikan oleh presiden dan juga kementerian keuangan memalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 penghematan anggaran belanja kementerian dan lembaha di hemat sebanyak Rp 256,10 triliun. Perintah tersebut di perkuat dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan surat kementerian Keuangan.

3. *Make Moral Judgment*

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Kompas.com menyimpulkan bahwa dari perintah yang telah di berikan wakil kementerian pekerja umum akan memangkas anggaran sebesar 80 persen atau Rp 81 triliun.

4. *Treatment Recommendation*

Melihat dari elemen *treatmen recommendation*, Kompas.com menuliskan 16 pos anggaran belanja bersumber dari surat Kementerian Keuangan S-37/MK.02/2025, surat tersebut berisikan pos – pos apa saja yang mengalami efisiensi anggaran. Pos tersebut termasuk Alat tulis dan kantor (ATK) dipangkas 90 persen Percetakan dan souvenir 75,9 persen, Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan 73,3 persen Belanja lainnya 59,1 persen Kegiatan seremonial 56,9 persen Perjalanan dinas 53,9 persen Kajian dan analisis 51,5 persen Rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen Jasa konsultan 45,7 persen Honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen Infrastruktur 34,3 persen Peralatan dan mesin 28 persen Diklat dan bimtek 29 persen Lisensi aplikasi 21,6 persen Bantuan pemerintah 16,7 persen Pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen

2. Analisis Media (Kompas.com)

b. Analisis Berita 2

Judul :Anggaran Dipangkas 80 Persen, Kementerian PU Pastikan Program 2025 Tetap Berjalan

Sumber :Kompas.com

Tanggal :Senin, 3 Februari 2025

Ringkasan :Berita ini berisikan Kementerian Pekerjaan Umum yang akan tepat menjalankan program pembangunan-nya meskipun mengalami pemotongan anggaran akibat efisiensi APBN sebesar 80 persen.

Tabel 4. 2 Analisis Artikel Berita 2 Kompas.com

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan program pembangunan tetap berjalan meski anggaran kementeriaannya untuk 2025 dipangkas 80 persen dari total Rp 110,95 triliun.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemangkasan bisa terjadi akibat intsruksi yang di perintahkan oleh presiden dan di lanjutkan oleh menteri keuangan dengan penghematan anggaran kementerian sebesar Rp. 256,10 triliun.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Menteri Pekerjaan Umum Dody mengatakan bahwa kalau kementerian pekerja umum masih me-review dan pemangkasan mana yang bisa di ajukan ulang.

<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Wakil menteri diana menyebutkan dengan adanya pemangkasan, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum hanya memiliki anggaran sebesar Rp. 29,95 triliun
--	--

Rincian Analisis :

1. ***Define Problem***

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Kompas.com ini mendefinisakn Kementerian Pekerjaan Umum akan tetap berfokus terhadap program pembangunan meskipun telah menerima pemotongan anggaran sebesar 80 persen. Hal ini bisa di lihat dari pemberitaan yang di tuliskan berfokus kepada efisiensi anggaran kementerian pekererja umum yang nominal angka pemotonganya sangat besar.

2. ***Diagnose Causes***

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah ini adalah perinta yang di berikan oleh presiden dan juga kementerian keuangan yaitu penghematan anggaran belanja kementerian dan lembaga di hemat sebanyak Rp 256,10 triliun. Perintah tersebut di perkuat dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan surat kementerian Keuangan S-37/MK.02/2025.

3. ***Make Moral Judgment***

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Kompas.com menyimpulkan bahwa Kementerian Keuangan akan me-review pemotongan yang di berikan kepada mereka. Langkah tersebut di tuliskan langsung oleh kompas dari pernyataan yang di berikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

4. ***Treatment Recommendation***

Melihat dari elemen *treatmen recommendation*, Kompas.com menuliskan dengan adanya pemangkasan yang di berikan sebesar 80 persen, Kementerian Pekerjaan umum hanya memiliki anggaran sebesar Rp.29,25 triliun saja. Pemangkasan sebesar Rp. 81 triliun, pemangkasan tersebut di

sebutkan oleh kordinator bidang perekonomian di dalam penulisan yang di berikan Kompas.com.

3. Analisis Media (Kompas.com)

c. Analisis Berita 3

Judul :Rencana Pemotongan Anggaran Kemdiktisaintek Rp 22,5 Triliun Disebut Terbesar Setelah Kementerian PU

Sumber :Kompas.com

Tanggal :Rabu, 5 Februari 2025

Ringkasan :Berita ini berisikan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi yang akan berpotensi memiliki pemangkasan anggaran terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum.

Tabel 4. 3 Analisis Artikel Berita 3 Kompas.com

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi akan berpotensi memiliki pemangkasan anggaran terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dengan pemangkasan sebesar Rp. 22,5 triliun.
<i>Diagnouse Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perintah melalui Kementerian Keuangan bahwa mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian/lembaga untuk tahun 2025.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Sekretaris Jendral Kemendiktisaintek, Togar menyebutkan bahwa program prioritas kemendiktisaintek akan terus berjalan tetapi akan di kurangi. Togar juga menyebutkan bahwa pengalokasian dana anggaran untuk program beasiswa tetap di pertahakan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Efisiensi Anggaran diprioritaskan untuk pos-pos tertentu, yaitu dengan memprioritaskan pemangkasan pada pos-pos tertentu seperti dana dari pinjaman dan hibah, rupiah murni yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran 2025, serta anggaran dari PNBPN-BLU dan SBSN yang tidak bersifat wajib atau mendesak.

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Kompas.com ini mendefinisakn Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi akan berpotensi memiliki pemangkasan anggaran terbesar kedua setelah

Kementerian Pekerjaan Umum dengan pemangkasan sebesar Rp. 22,5 triliun. Hal ini bisa di lihat dari pemberitaan yang di tuliskan berfokus kepada angka pemangkasan yang di terima oleh Kemendiktisaintek cukup besar sebesar 39 persen setelah kementerian pekerjaan umum.

2. ***Diagnose Causes***

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Kompas.com ini adalah perintah yang di berikan oleh kementerian keuangan yaitu penghematan anggaran belanja kementerian dan lembaga di hemat sebanyak Rp 256,10 triliun.

3. ***Make Moral Judgment***

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Kompas.com menyimpulkan bahwa Sekretaris Jendral Kemendiktisaintek, Togar menyebutkan bahwa program prioritas kemendiktisaintek akan terus berjalan tetapi akan di kurangi. Togar juga menyebutkan bahwa pengalokasian dana anggaran untuk program beasiswa tetap di pertahakan.

4. ***Treatment Recommendation***

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menuliskan penjelasan yang berisikan efisiensi anggaran diprioritaskan pos-pos tertentu. Di dalam penulisan tersebut tertulis memprioritaskan pemangkasan pada pos-pos tertentu seperti dana dari pinjaman dan hibah, rupiah murni yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran 2025, serta anggaran dari PNBK-BLU dan SBSN yang tidak bersifat wajib atau mendesak.

4. **Analisis Media (Kompas.com)**

d. **Analisis Berita 4**

Judul :Kemendiktisaintek Akan Potong Anggaran untuk Riset Imbas Efisiensi
Sumber :Kompas.com
Tanggal :Selasa, 11 Februari 2025

Ringkasan :Berita ini berisikan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi yang akan memotong anggaran untuk riset yang diakibatkan oleh efiseiansi anggaran 2025

Tabel 4. 4 Analisis Artikel Berita 4 Kompas.com

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Besaran dana riset dari sisi anggaran pendapatan anggaran belanja negara, sudah kecil namun harus mengalami pemotongan anggaran untuk riset.
<i>Diagnouse Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi akan memotong anggaran untuk riset imbas dari efisiensi anggaran 2025 sebesar 39 persen atau Rp. 22,5 triliun, padahal seharusnya undang – undang no 12 tahun 2012 terkait pandangan perguruan tinggi bertuliskan, dana riset harus sebesar 30 persen dari bantuan Oprasional Perguruan Tinggi. Tahun 2024 Kemendiktisaintek hanya membiayai 7 persen dari Rp. 1,2 Triliun.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Sekretaris Jendral Kemendiktisaintek Togar mengkonfirmasi pada berita tersebut bahwa Kemendiktisaintek masih menghitung dampak yang akan muncul jika ada pemotongan anggaran
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Sekretaris Jendral Kemendiktisaintek Togar menyebutkan kalau program prioritas yang di miliki kemendiktisaintek tak akan hilang tetapi akan dikurangi

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Kompas.com ini mendefinisakn Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi akan memotong anggaran untuk riset imbas dari efisiensi anggaran 2025 sebesar 39 persen atau Rp. 22,5 triliun. Fauzan Adziman menyebutkan kalau kemendiktisaintek masih menyoba untuk seminimal mungkin mengatur dana untuk riset.

”Bayangkan kalau kita potong lagi lebih kecil lagi gitu. Jadi hanya 7 persen dari jumlah proposal yang bisa kami danai,” Ujar Fauzan (Kompas, 2025)

berkaca dari tahun 2024, kemendiktisaintek hanya bisa membiayai 7 persen dari total proposal yang sudah untuk program-program, jumlah pendanaan tersebut sekitar 7 persen dari Rp. 1,2 triliun.

2. ***Diagnose Causes***

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Kompas.com ini adalah Anggaran Pendidikan Tinggi Sains Teknologi akan mengalami pemotongan sebesar Rp. 22,5 triliun dari pagu anggaran yang telah di setuju oleh DPR imbas perintah yang diberikan instruksi presiden yaitu inpres Nomor 1 Tahun 2025.

3. ***Make Moral Judgment***

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Kompas.com menuliskan bahwa Direktur Jendral Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan mengkhawatirkan pengeluaran untuk kemendiktisaintek hanya sebesar 7 persen saja, dalam kutipan yang di tulis oleh Kompas.com Fauzan terlihat cukup cemas

4. ***Treatment Recommendation***

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menuliskan kalau Jendral Kemendiktisaintek masih memprioritaskan program-program dari kementerian tersebut, ia mengatakan kalau program tersebut tidak akan hilang namun akan di kurangi.

5. **Analisis Media (Kompas.com)**

e. **Analisis Berita 5**

Judul :Anggaran Kemenkes Dipotong Rp 19 Triliun, Bakal Pengaruhi Program Kesehatan?

Sumber :Kompas.com

Tanggal :Kamis, 6 Februari 2025

Ringkasan :Kementerian Kesehatan melakukan penyortiran terkait program – program dari kementerian tersebut, hal itu bisa terjadi akibat pemangkasan yang di terima oleh kementerian tersebut. Kementerian kesehatan mengakui dari adanya pemangkasan tersebut ada beberapa program yang tidak masuk kedalam

anggaran yang mengakibatkan diharuskan untuk penyesuaian dana.

Tabel 4. 5 Analisis Artikel Berita 1 Kompas.com

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengakui ada program Kementerian kesehatan yang tidak masuk dalam anggaran.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berisikan perintah untuk pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD sebesar Rp. 306,69 triliun.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Kementerian Kesehatan sangat mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang telah dikeluarkan melalui Inpres efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bertujuan agar kas yang di miliki oleh negara bisa dapat digunakan untuk program – program yang lebih diprioritaskan.

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Kompas.com ini mendefinisikan kalau Kementerian Kesehatan sedang melakukan penyortiran terhadap program dari kementerian tesebut. Penyortiran tersebut bisa terjadi akibat efisiensi anggaran sebesar Rp. 19,6 triliun. Budi Gunadi selaku Menteri Kesehatan mengatakan setekah diskusi yang di lakukan dengan DPR, pihak Menkes akan mengefisiensikan beberapa program yang sedang di jalankan.

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Kompas.com ini adalah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berisikan perinyaj untuk pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD sebesar Rp. 306,69 triliun. Rincian anggaran tersebut termasuk anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp. 251,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar 50,59 triliun.

3. *Make Moral Judgment*

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Kompas.com menuliskan bahwa Budi Gunadi menyadari kalau masih ada program yang perlu di tekan anggarannya. Kementerian Kesehatan yang perlu ditekan anggarannya. Berita ini juga menuliskan kalau Menkes mendukung kebijakan dari efisiensi anggaran yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden no 1 tahun 2025 dalam mengefisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Budi Gunaidi juga mengatakan

"Program efisiensi ini kita sih sadar bahwa memang ada ruang untuk efisiensi," ujar Budi Gunadi (Kompas, 2025)

4. ***Treatment Recommendation***

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menuliskan saran yang di berikan meliputi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kalau efisiensi anggaran ini dapat digunakan untuk mendanai program – program prioritas yang lebih berdampak terhadap masyarakat, program tersebut seperti Program Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan dan Energi, dan yang terakhir Perbaikan Sektor Kesehatan.

6. **Analisis Media (Kompas.com)**

f. **Analisis Berita 6**

Judul	:Efisiensi Anggaran, Kemenkes Pastikan Layanan Kesehatan Tak Terganggu.
Sumber	:Kompas.com
Tanggal	:Kamis, 6 Februari 2025
Ringkasan	:Kementerian Kesehatan melakukan melakukan penyisiran anggaran dengan detail dikarenakan sedang diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran untuk tidak mengganggu pelaksanaan layanan dan program kesehatan untuk masyarakat. Efisiensi Anggaran ini di perintahkan melalui Instruksi Presiden (inpres) yang di mana menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD.

Tabel 4. 6 Analisis Artikel Berita 1 Kompas.com

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kementerian Kesehatan sedang melakukan penyisiran anggaran dengan tujuan agar anggaran yang tidak dibutuhkan tidak akan mengganggu pelaksanaan layanan dan program kesehatan yang di butuhkan oleh masyarakat.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 menginstruksikan untuk pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD 2025 sebesar Rp. 306,69 triliun.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Menteri Kesehatan akan memastikan bahwa pemotongan tersebut tidak akan memengaruhi kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa efiseinsi anggaran bertujuan agar kas yang di miliki oleh negara bisa dapat digunakan untuk program – program yang lebih diprioritaskan.

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Kompas.com ini mendefinisikan kalau Kementerian Kesehatan sedang melakukan penyisiran anggaran dengan tujuan agar anggaran yang tidak dibutuhkan tidak akan mengganggu pelaksanaan layanan dan program kesehatan yang di butuhkan oleh masyarakat. Kompas.com mendefinisikan masalah ini sebagai sebua kebutuhan yang harus diselesaikan dikarenakan kebijakan yang di berikan oleh Instruksi Presiden untuk harus segera di laksanakan.

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Kompas.com ini adalah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berisikan perinyaj untuk pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD.

3. *Make Moral Judgment*

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Kompas.com menuliskan bahwa Budi Gunadi menyadari kalau meskipun ada penyisiran anggaran terhadap anggaran Keenterian Kesehatan hal tersebut tidak akan mempengaruhi layanan mereka kepada masyarakat. Melihat hal tersebut Kompas.com tidak ingin membuat

masyarakat khawatir akibat efisiensi anggaran yang di terima oleh Kementerian Kesehatan.

4. **Treatment Recommendation**

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menuliskan saran yang di berikan meliputi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kalau efisiensi anggaran ini dapat digunakan untuk mendanai program – program prioritas yang lebih berdampak terhadap masyarakat, program tersebut seperti Program Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan dan Energi, dan yang terakhir Perbaikan Sektor Kesehatan. Melihat dari hal tersebut Kompas.com menuliskan bahwa efisiensi anggaran ini bertujuan untuk bisa memprioritaskan program – program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

7. **Analisis Media (Kompas.com)**

g. **Analisis Berita 7**

Judul :Dipangkas 43,66 Persen, Anggaran Kemenhub 2025 Tersisa Rp 13,58 Triliun.

Sumber :Kompas.com

Tanggal :Rabu, 12 Februari 2025

Ringkasan :Kementerian Perhubungan resmi memangkas anggarannya sebesar 43,66 dari total pagu anggaran 2025. Dengan demikian anggaran kemenhub 2025 menjadi Rp.13,58 triliun. Walau pada awalnya Kementerian Perhubungan memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 31,45 triliun, hal itu bisa terjadi akibat Surat Menyeri Keuangan nomor S-867/MK.02/2024.

Tabel 4. 7 Analisis Artikel Berita 1 Kompas.com

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kementerian Perhubungan mendapatkan pemangkasan anggaran sebesar 43,66 persen hingga menyisakan sebesar Rp.13,58 triliun dari total pagu anggaran 2025.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perintah yang di berikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisiensikan anggaran belanja APBN 2025 sebesar Rp.306,7 triliun yang di mana efisiensi tersebut mencakup belanja oprasional dan non-oprasional di seluruh K/L

Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral)

Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan bahwa pagu anggaran 2025 yang di miliki kemenhub ini akan di manfaatkan untuk pengakomodasian belanja pegawai, belanja oprasional dan subsidi printis.

Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah)

Efisiensi Anggaran tidak akan mempengaruhi belanja pegawai ataupun bantuan sosial (bansos).

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Kompas.com ini mendefinisikan kalau Kementerian Perhubungan mendapatkan pemangkasan anggaran sebesar 43,66 persen hingga menyisakan sebesar Rp.13,58 triliun dari total pagu anggaran 2025. Pada penulisan berita yang dituliskan oleh Kompas.com mereka hanya memastikan kalau Kementerian Perhubungan hanya mematuhi perintah yang diberikan oleh pemerintah.

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Kompas.com ini adalah Penyebab pemangkasan yang secara eksplisit diidentifikasi berasal dari kebijakan efisiensi pengeluaran negara yang ditandatangani oleh Presiden melalui Inpres No. 1 Tahun 2025. Terdapat penekanan bahwa kebijakan ini bersifat nasional dan ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, bukan hanya untuk Kementerian Perhubungan.

3. *Make Moral Judgment*

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Kompas.com menuliskan bahwa Budi Gunadi menyadari kalau meskipun ada penyisiran anggaran terhadap anggaran Keenterian Kesehatan hal tersebut tidak akan mempengaruhi layanan mereka kepada masyarakat. Melihat hal tersebut Kompas.com tidak ingin membuat masyarakat khawatir akibat efisiensi anggaran yang di terima oleh Kementerian Kesehatan.

4. *Treatment Recommendation*

Melihat dari elemen *treatmen recommendation*, Kompas.com menuliskan saran yang di berikan oleh Kompas.com itu sendiri tidak terlalu banyak

melainkan mereka hanya menyebutkan kalau rencana dari penghematanan Efisiensi Anggaran ini tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial. Kompas.com ingin memastikan kalau masyarakat tidak perlu khawatir akibat dari adanya efisiensi anggaran ini.

8. Analisis Media (Kompas.com) ‘

h. Analisis Berita 8

Judul :Efisiensi Anggaran, Ruang Pusat Pelayanan Kemenhub Tak Sedingin Dulu dan Jadi Remang-remang.

Sumber :Kompas.com

Tanggal :Jumat, 7 Februari 2025

Ringkasan : Kementerian Perhubungan menghadapi pengurangan anggaran dan menerapkan berbagai langkah efisiensi. Salah satu langkah tersebut adalah membatasi penggunaan AC di kantor, sehingga ruangan yang biasanya sejuk kini terasa lebih panas. Di samping itu, jumlah lampu yang dinyalakan juga dikurangi, sehingga suasana gedung tampak lebih gelap, termasuk di lobi dan beberapa lantai.

Tabel 4. 8 Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kementerian Perhubungan mendapatkan pemangkasan anggaran, akibat dari adanya pemangkasan tersebut Gedung Cipta Kemenhub mengalami pembatasan penggunaan AC dan penyesuaian lainya.
<i>Diagnouse Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemangkasan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi perbelanjaan dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Gedung Cipta mengalami suasana yang gelap akibat pengurangan lampu yang dinyalakan. Selain lampu beberapa lift yang berada di gedung juga di non aktifkan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Walaupun banyak pos yang terdampak akibat adanya efisiensi anggaran, Efisiensi tidak berlaku untuk belanja pegawai dan juga bantuan sosial.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Kompas.com ini mendefinisikan kalau Kementerian Perhubungan mendapatkan pemangkasan, akibat dari adanya pemangkasan tersebut Gedung Cipta Kemenhub mengalami pembatasan penggunaan AC dan penyesuaian lainnya seperti pencahayaan yang di kurangi dan lift yang tidak semuanya di oprasikan. Melihat dari hal yang dituliskan oleh Kompas.com ini Kompas.com menginginkan pembaca untuk melihat dampak langsung akibat dari efisiensi anggaran kepada masyarakat.

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Kompas.com ini adalah Pemangkasan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi perbelanjaan dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

3. *Make Moral Judgment*

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Kompas.com menuliskan bahwa Gedung Cipta mengalami suasana yang gelap akibat pengurangan lampu yang dinyalakan. Selain lampu beberapa lift yang berada di gedung juga di non aktifkan. Salah satu pegawai di Gedung Cipta berkata

"Gelapnya suasana gedung itu sudah terjadi seminggu belakangan ini karena efisiensi," dan "Bahkan kemarin lift di gedung itu enggak semua hidup, gantian karena efisiensi," kata seorang pegawai di gedung tersebut (Kompas, 2025).

Kompas.com ingin memperlihatkan kepada pembaca kalau akibat dari efisiensi anggaran ini sangat berdampak bagi para pegawai yang bekerja di sektor – sektor yang termasuk dari efisiensi anggaran tersebut.

4. *Treatment Recommendation*

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menuliskan saran yang di berikan oleh Kompas.com itu adalah efisiensi anggaran ini tidak hanya menargetkan Kementerian Perhubungan saja, melainkan mencakup pos – pos seperti belanja oprasional, perkantoran, biaya

pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur dan pengadaan peralatan dan mesin. Di akhir pemberitaan Kompas.com juga menuliskan kalau efisiensi anggaran ini tidak akan berlaku untuk belanja pegawai dan juga belanja bantuan sosial.

9. Analisis Media (Kompas.com)

i. Analisis Berita 9

Judul :Kemenag Terkena Pemangkasan Anggaran Rp 12 Triliun.
 Sumber :Kompas.com
 Tanggal :Kamis, 13 Februari 2025
 Ringkasan :Kementerian Agama mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 12 triliun dari total pagu Rp 78 triliun pada tahun 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa Kemenag merupakan salah satu kementerian yang mengalami pemotongan terbesar. Pengurangan ini berdampak pada alokasi anggaran di berbagai unit eselon I, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari 2025 mengenai efisiensi belanja.

Tabel 4. 9 Analisis Artikel Berita 9 Kompas.com

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kementerian Agama mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp. 12 triliun dari total pagu Rp. 78 triliun, hal tersebut menjadikan Kementerian Agama menjadi salah satu menteri dengan pemotongan terbesar.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemotongan tersebut didasarkan dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan sebagai kebijakan dari efisiensi anggran.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Menteri Agama Nasarudin mengatakan bahwa kementerian Agama menjadi salah satu kementerian di Indonesia dengan salah satau pemangkasan anggaran terbesar di tahun 2025.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Perincian APBN Kementerian Agama 2025 di bagi berdasarkan unit eselon I

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Kompas.com ini mendefinisikan kalau Kementerian Agama mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp. 12 triliun dari total pagu Rp. 78 triliun, hal tersebut menjadikan Kementerian Agama menjadi salah satu menteri dengan pemotongan terbesar. Kompas.com menuliskan angka yang di terima oleh Kemenag ini sangat besar, di dalam pemberitaanya juga mereka tidak menuliskan rincian apa saja yang terkena pangkas melainkan hanya sebuah angka pemangkasan saja.

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Kompas.com ini adalah Pemotongan didasarkan dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan sebagai kebijakan dari efisiensi anggran.

3. *Make Moral Judgment*

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Kompas.com menuliskan bahwa Menteri Agama Nasarudin mengatakan bahwa kementerian Agama menjadi salah satu kementerian di Indonesia dengan salah satau pemangkasan anggaran terbesar di tahun 2025. Nasarudi menyampaikan

"mungkin salah satu kementerian yang paling banyak potongan" ujar Nasarudin (Kompas.com)

Dalam pemberitaan ini Kompas.co ingin menunjukan juga kalau nasarudin pasih walaupun Kementerian Agama sangat terdampak akibat pemangkasan yang sangat besar, bisa dilihat dari cara pemberitaanya yang di mana Kementerian Agama tidak menunjukan sikap resistensi.

4. *Treatment Recommendation*

Melihat dari elemen *treatmen recommendation*, Kompas.com menuliskan saran yang di berikan oleh Kompas.com adalah mereka menuliskan kalau Kementerian Agama merasa terdampak di pagu anggaran Kemenag 2025 yang terbagi dalam beberapa unti eselon I. Unit Eselon I tersebut berisikan Rupiah Murni, PNBB, BLU dan SPSN.

10. Analisis Media (Kompas.com)

j. Analisis Berita 10

Judul :Efisiensi Anggaran, Kemenag Tetap Salurkan Tunjangan Guru Non-PNS.

Sumber :Kompas.com

Tanggal :Minggu, 16 Februari 2025

Ringkasan :Meskipun terdapat efisiensi dalam anggaran, Kementerian Agama tetap memberikan tunjangan insentif kepada guru non-PNS di RA dan Madrasah. Tunjangan ini merupakan bentuk penghargaan dan motivasi dari pemerintah terhadap dedikasi para guru. Penyaluran dilakukan secara bertahap, dengan syarat bahwa guru harus aktif mengajar, terdaftar di SIMPATIKA, belum memiliki sertifikasi, serta memiliki NPK atau NUPTK. Petunjuk teknis mengenai pemberian tunjangan saat ini sedang disusun oleh Kemenag.

Tabel 4. 10 Analisis Artikel Berita 10 Kompas.com

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kementerian Agama tetap akan menyalurkan tunjangan insentif bagi guru non-PNS meski Kementerian Agama terkena efisiensi anggaran.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Kementerian Agama sudah bersepakat dengan DPR untuk mengalokasikan anggaran bagi tunjangan insentif bagi guru RA dan Madrasah tetapi bukan untuk PNS.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pembayaran tunjangan insentif ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi para guru dalam mecerdaskan generasi bangsa.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Kementerian Agama memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Insentif hanya untuk guru non-PNS pada Raudlatul Athfal dan Madrasah .

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Kompas.com ini mendefinisikan kalau Kementerian Agama tetap akan menyalurkan tunjangan insentif bagi guru non-PNS meski Kementerian Agama terkena efisiensi anggaran. Kompas.com ingin membuktikan melalui

pemberitaanya yaitu meskipun Kementerian Agama terkena efisiensi anggaran mereka tetap ingin berkomitmen untuk tetap menyalurkan tunjangan mereka kepada guru non-PNS.

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Kompas.com ini adalah Kementerian Agama sudah bersepakat dengan DPR untuk mengalokasikan anggaran bagi tunjangan insentif bagi guru RA dan Madrasah tetapi bukan untuk PNS.

3. *Make Moral Judgment*

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Kompas.com menuliskan bahwa Menteri Agama Suyitno mengatakan bahwa pembayaran tunjangan insentif ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi yang di berikan kepada para guru dikarenakan sudah mengajar generasi bangsa. Kompas.com juga menuliskan bahwa tunjangan insentif ini merupakan cara untuk memotivasi guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam proses mengajar. Pemberitaan ini menggambarkan kalau pemerintah memiliki sifat yang adil dan juga bertanggung jawab.

4. *Treatment Recommendation*

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menuliskan saran yang di berikan oleh Kompas.com adalah Kementerian Agama memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Insentif hanya untuk guru non-PNS pada Raudlatul Athfal dan Madrasah . Pemberitahuan Juknis tersebut bertujuan untuk memperjelas perincian siapa saja yang bisa menerima insentif tersebut, syarat administratif juga di sebutkan di dalam pemberitaan ini. Kompas.com menuliskan pemberitaan ini ialah untuk bisa membuat insentif ini tidak seperti janji saja melainkan agar dana yang di salurkan bisa sampai ke sasaran yang di tuju oleh Kementerian Agama.

4.2.2 Analisis Artikel Berita Tempo.co

1. Analisis Media (Tempo.co)

a. Analisis Berita 1

Judul :Alasan Sri Mulyani Tahan Anggaran Menteri PU hingga Berbuntut Pembangunan Bendungan Dihentikan Sementara.

Sumber :Tempo.co

Tanggal :Rabu, 20 November 2024

Ringkasan :Pembangunan bendungan sementara dihentikan karena anggaran infrastruktur ditahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa anggaran akan difokuskan pada ketahanan pangan, air, dan energi dengan memaksimalkan infrastruktur yang sudah ada. Penyesuaian ini dilakukan sambil menunggu sinkronisasi program antar kementerian bersama Bappenas. Selain itu, sebagian dari anggaran 2025 yang berjumlah Rp116 triliun akan dialihkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah pemisahan Kementerian PUPR.

Tabel 4. 11 Analisis Artikel Berita 1 Tempo.co

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan anggaran infrastruktur ditahan oleh menteri keuangan Sri mulyani, hal tersebut menghambat pembangunan bendungan diberhentikan sementara.
<i>Diagnouse Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemberentian pembangunan bendungan ini dilakukan atas arahan yang telah di berikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Penahanan tersebut akan berhenti jika antar kementerian dan Badan Perencana Pembangunan Nasional sudah menyinkronisasikan program kerja.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Dengan anggaran yang terbatas, Dody menyebutkan kalau Kementerian Pekerjaan Umum akan berfokus kepada program Asta Cita Presiden Prabowo.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Menteri Pekerjaan Umum akan mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada dan akan optimistis 259 bendungan yang ada bisa mencukupi kebutuhan.

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Tempo.co ini mendefinisikan kalau Kementerian Pekerja Umum ini terhambat akibat Menteri Keuangan Sri Mulyani menahan anggaran infrastruktur yang di miliki oleh Kementerian Pekerja Umum. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pembangunan bendungan. Di dalam pemberitaan ini tidak menjelaskan apa penyebab dari penahanan anggara infrastruktur ini, melainkan hanya menonjolkan kata menghambat dari pemberitaanya.

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Tempo.co adalah penyebab dari penahanan anggaran beraskan dari arahan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan menahan anggaran sampai antar kementerian dan bappenas sudah menyikronasikan program kerja secara bersamaan.

3. *Make Moral Judgment*

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Tempo.co menuliskan bahwa Kementerian Pekerjaan Dody mengatakan bahwa kementerian pekerja umum 2025 akan lebih berfokus kepada program Presiden Prabowo yaitu Astra Cita, yang di mana fokus mereka untuk infrastruktur ketahanan pangan, air dan juga energi. Dalam pemberitaan ini tempo ingin menjelaskan kalau dengan adanya efisiensi, pembangunan jadi tidak tergesa – gesa dan juga bisa lebih berfokus kepada pembangunan yang sudah ada.

4. *Treatment Recommendation*

Melihat dari elemen *treatmen recommendation*, Tempo.co menuliskan mengapa Dody mengatakan pembangunan pembangunan fisik akan diberhentikan sementara, hal tersebut dikarenakan pemerintah berfokuskan kepada infrastruktur yang sudah ada. Dody beroptimis dengan adanya 259 bendungan sudah bisa mencukupi kebutuhan. Dody hanggoda juga mengatakan;

"Jadi, dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya, ya itu saja yang lebih kita revitalisasikan, optimalkan untuk bisa

menyukseskan Asta Cita Pak Presiden Prabowo,” kata Menteri PU Dody Hanggodo (Tempo, 2024)

Dari pemberitaan yang ditulis oleh Tempo.co ini, mereka ingin pembaca untuk mengetahui kalau pemerintah menginginkan pengoptimalan dalam pekerjaan yang kususny di lakukan oleh kementerian pekerja umum.

2. Analisis Media (Tempo.co)

b. Analisis Berita 2

Judul :Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81 Triliun, Dody Hanggodo Minta Kemenkeu Kaji Ulang.

Sumber :Tempo.co

Tanggal :Senin, 3 Februari 2025

Ringkasan :Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa Presiden Prabowo meminta penghematan anggaran sebesar Rp81 triliun dari total pagu Rp110 triliun untuk tahun 2025. Penghematan ini akan dilakukan secara bertahap, dengan penekanan awal pada program swasembada pangan seperti irigasi dan pembangunan jalan daerah. Instruksi dari Presiden serta surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta penghematan APBN hingga Rp306,69 triliun, yang mencakup pemangkasan signifikan pada belanja alat tulis kantor. Namun, Kementerian Keuangan membantah keabsahan tabel efisiensi kementerian yang beredar di media sosial.

Tabel 4. 12 Analisis Artikel Berita 2 Tempo.co

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Menteri Pekerja Umum Dody Hanggodo mengakui kalau kementeriannya diharuskan untuk mengefisiensikan anggran sebesar Rp. 81 triliun dari total Rp. 110 triliun pagu anggaran 2025 oleh presiden Prabowo
<i>Diagnouse Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Presiden Prabiwo menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja, di dalam perintahnya tersebut prabowo meminta untuk K/L dan kepala daerah bisa menghemat APBN tahun 2025 sampai Rp. 306,69 triliun.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Menteri Pekerja Umum Dody menyebutkan kalau mereka akan membaca ulang anggaran mana saja yang bisa di pangkas, setelah itu dia akan mengajukan anggaran ulang ke Kementerian Keuangan.

Rincian Analisis :

1. Define Problem

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Tempo.co ini mendefinisikan kalau Kementerian Pekerja Umum mendapatkan pengefisiensi anggaran sebesar Rp. 81 triliun dari total pagu anggaran Rp. 110 triliun. Dari hal tersebut, kementerian Pekerjaan umum diharuskan untuk menyusun ulang program prioritas untuk tahun 2025 ini.

2. Diagnose Causes

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Tempo.co adalah Presiden Prabiwo menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja, di dalam perintahnya tersebut prabowo meminta untuk K/L dan kepala daerah bisa menghemat APBN tahun 2025 sampai Rp. 306,69 triliun. Berdasarkan dari pemberitaan yang ditulis oleh tempo.co ini mereka ingin memberitahukan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak hanya bertujuan untuk Kementerian Pekerjaan Umum saja melainkan mencakup seluruh K/L.

3. Make Moral Judgment

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Tempo.co menuliskan Menteri Pekerja Umum Dody menyebutkan kalau mereka akan membaca ulang anggaran mana saja yang bisa di pangkas, setelah itu dia akan mengajukan anggaran ulang ke Kementerian Keuangan. Dari hal tersebut tempo.co ingin menjelaskan bahwa pemangkasan ini harus di telaah secara bersama supaya tidak ada ada salah perhitungan.

4. Treatment Recommendation

Melihat dari elemen *treatmen recommendation*, Tempo.co menuliskan adanya pengedaran surat Kementerian keuangan palsu. Kementerian keaungan membantah keabsahan informasi dari tabel efisiensi belanja K/L yang beredar di media sosial tersebut.

“Berdasarkan konfirmasi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), daftar yang beredar tersebut bukan produk dari Kementerian Keuangan dan bukan

merupakan lampiran surat S-37/MK.02/2025,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro (Tempo, 2025)

Tempo.co menjelaskan bahwa pembaca harus berhati – hati dalam menerima informasi yang ada dari semua *media online* dan pemberitaan.

3. Analisis Media (Tempo.co)

c. Analisis Berita 3

Judul :Wakil Ketua Komisi X DPR Tak Setuju Anggaran Kemendiktisaintek Dipangkas Rp 22 Triliun.

Sumber :Tempo.co

Tanggal :Kamis, 6 Februari 2025

Ringkasan :Wakil Ketua Komisi X DPR menolak pengurangan anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp22 triliun karena dianggap akan menghambat program pendidikan. Pemangkasan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi nasional yang sesuai dengan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan untuk menghemat belanja negara pada tahun 2025 hingga mencapai Rp256,1 triliun.

Tabel 4. 13 Analisis Artikel Berita 3 Tempo.co

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Ketidak sepakatan Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana atas pemotongan anggaran yang di terima oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebesar Rp. 22 triliun.
<i>Diagnouse Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pengimplementasian oleh Kementerian Keuangan upaya efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembafa sebesar Rp. 256,1 triliun pada 2025.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Maria Yonata menjelaskan kekhawatirannya terhadap pemangkasan anggaran bila terjadi kepada Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi, akan banyak program dan kebijakan yang tidak bisa terlaksaa akibat hal tersebut.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Komisi X DPR akan mengadakan dialog dengan Mendiktisaintek untuk membahas dampak dari pemotongan, termasuk tunjangan kinerja bagi dosen, serta menyusun revisi anggaran yang akan disampaikan kepada Kemenkeu.

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Tempo.co ini mendefinisikan kalau Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi mendapatkan pemangkasan drastis sebesar Rp.22 triliun, dari hal tersebut Maria mengatakan ketidak setujuannya akibat pemangkasan tersebut. Tempo.co ingin memberitakan bahwa efisiensi anggaran yang di terima oleh Kemendiktisaintek sangat tidak proposional terhdap sektor pendidikan.

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Tempo.co adalah Pengimplementasian oleh Kementerian Keuangan upaya efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembafa sebesar Rp. 256,1 triliun pada 2025.

3. *Make Moral Judgment*

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Tempo.co menuliskan Maria Yonata mengkhawatirkan pemangkasan anggaran bila terjadi kepada Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi, akan banyak program dan kebijakan yang tidak bisa terlaksaan akibat hal tersebut. Tempo.co menuliskan dalam pemberitaanya bahwa mengapa kementerian dalam sektor pendidikan mengalami pemangkasan yang sangat amat besar.

4. *Treatment Recommendation*

Melihat dari elemen *treatmen recommendation*, Tempo.co menuliskan Komisi X DPR akan melaksanakan dialog lanjutan dengan Mendiktisaintek. Mereka akan menyusun revisi anggaran dan membahas kelanjutan tunjangan dosen, kemudian hasilnya akan disampaikan kepada Menkeu paling lambat pada 14 Februari 2025.

4. Analisis Media (Tempo.co)

d. Analisis Berita 4

Judul :Anggaran Kemendiktisaintek Dipangkas Rp 22,5 T, Pemotongan Program Riset 20 Persen.

Sumber :Tempo.co

Tanggal :Minggu, 9 Februari 2025

Ringkasan :Kemendiktisaintek mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp22,5 triliun dan saat ini sedang melakukan perhitungan ulang anggaran, dengan penekanan pada pemeliharaan layanan publik dan program-program prioritas. Pemotongan yang paling signifikan berasal dari belanja manajemen, termasuk perjalanan dinas dan rapat. Anggaran untuk riset juga mengalami pemangkasan sebesar 20 persen. Kebijakan ini diambil berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menkeu S-37/MK.02/2025 untuk mencapai efisiensi APBN hingga Rp306,6 triliun.

Tabel 4. 14 Analisis Artikel Berita 4 Tempo.co

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kemendiktisaintek mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun sebagai dampak dari kebijakan efisiensi belanja negara yang ditetapkan melalui Inpres No. 1 Tahun 2025.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemangkasan berasal dari kebijakan efisiensi fiskal oleh Presiden Prabowo melalui Inpres No. 1/2025 dan diperkuat oleh Surat Menkeu S-37/MK.02/2025 yang menargetkan efisiensi besar.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pemangkasan anggaran tidak termasuk program efisiensi seperti belanja pegawai dan juga bantuan sosial, mereka akan memperhatikan layanan publik, program quick win Presiden Prabowo Subianto dan program prioritas nasional.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	16 pos belanja yang di efisiensi berisikan alat tulis kantor dan kegiatan seremonial yang keduanya di pangkas sebesar 90 persen dan 56,9 persen.

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Tempo.co ini mendefinisikan kalau Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi terkena

pemangkasan anggaran sebesar Rp. 22,5 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan mengatakan kalau kementerian sedang mengusulkan kalkulasi ulang pagu anggaran, Pemangkasan tersebut termasuk program riset.

2. ***Diagnose Causes***

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang dituliskan oleh Tempo.co adalah Pemangkasan berasal dari kebijakan efisiensi fiskal oleh Presiden Prabowo melalui Inpres No. 1/2025 dan diperkuat oleh Surat Menkeu S-37/MK.02/2025 yang menargetkan efisiensi besar.

3. ***Make Moral Judgment***

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang diberikan oleh Tempo.co menuliskan Pemangkasan anggaran tidak termasuk program efisiensi seperti belanja pegawai dan juga bantuan sosial, mereka akan memperhatikan layanan publik, program quick win Presiden Prabowo Subianto dan program prioritas nasional.

4. ***Treatment Recommendation***

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Tempo.co menuliskan 16 pos belanja yang di efisiensi berisikan alat tulis kantor dan kegiatan seremonial yang keduanya di pangkas sebesar 90 persen dan 56,9 persen. Sri Mulyani mengatakan

"Kementerian dan lembaga diminta Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan," ujar Sri Mulyani (Tempo, 2025).

5. **Analisis Media (Tempo.co)**

e. **Analisis Berita 5**

Judul :Anggaran Kementerian Kesehatan Kena Pangkas hingga Rp 19,6 Triliun

Sumber :Tempo.co

Tanggal :Kamis, 6 Februari 2025

Ringkasan :Anggaran yang dimiliki oleh kementerian kesehatan mengalami pemangkasan anggaran hingga lebih dari Rp. 19,6 triliun. Pemangkasan tersebut imbas dari Inpres tentang efisiensi

belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Tabel 4. 15 Analisis Artikel Berita 5 Tempo.co

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kementerian Kesehatan mendapatkan pemangkasan anggaran sebesar 18,85 persen atau sebesar Rp. 19,6 triliun dari total anggaran Rp. 105,7 triliun.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perintah efisiensi anggaran didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Kemenkes sedang mempertimbangkan pengalokasian anggaran pada program – program yang sedang di rancang.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Selain Kemkes, Kementrian PU juga terdampak pemangkasan hingga 73 persen dari total pagu anggaran 2025.

Rincian Analisis :

1. ***Define Problem***

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Tempo.co ini mendefinisikan kalau Kementerian kesehatan mengalami pemangkasan anggaran sebesar 18,85 persen atau sekitar Rp. 19,6 triliun. Kemenkes awalya memiliki anggaran sebesar Rp. 105,7 triliun hingga akhirnya terpankas Rp. 19,6 triliun.

2. ***Diagnose Causes***

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Tempo.co adalah Perintah efisiensi anggaran didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

3. ***Make Moral Judgment***

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Tempo.co menuliskan akan ada pertimbangan pengalokasian anggaran untuk program – program yang sudah di rancang, efisiensi anggran tersebut berdampak besar bagi program prioritas.

4. ***Treatment Recommendation***

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Tempo.co menuliskan tidak hanya kementerian kesehatan saja yang terdampak dari efisiensi anggaran ini, melainkan ada kementerian lain yang terdampak juga akibat efisiensi anggaran yang sudah di rancang oleh kementerian keuangan diantaranya, kementerian pekerjaan umum dan kementerian keuangan.

6. Analisis Media (Tempo.co)

f. Analisis Berita 6

Judul :Cara Kementerian Kesehatan Memangkas Anggaran Perjalanan Dinas

Sumber :Tempo.co

Tanggal :Rabu, 5 Februari 2025

Ringkasan :Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan pengurangan anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 50% untuk meningkatkan efisiensi belanja tahun 2025, termasuk pengurangan biaya perjalanan dinas yang kini hanya diperbolehkan menggunakan pesawat kelas ekonomi. Instruksi dari Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi total sebesar Rp 306 triliun, didukung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui surat dan keputusan yang berkaitan dengan alokasi dana.

Tabel 4. 16 Analisis Artikel Berita 6 Tempo.co

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Pemotongan anggaran di Kementerian Kesehatan Sebesar 50 persen sebagai respons terhadap Instruksi Presiden.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemangkasan dilakukan untuk menjalankan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025 tentang efisiensi belanja K/L sebesar Rp 306 triliun.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pemotongan anggaran perjalanan dinas dilakukan dengan menghemat jenis kelas transportasi, yang awalnya di kelas bisnis diganti menjadi kelas ekonomi.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Presiden prabowo meminta efisiensi anggaran belanja 2025 sebesar Rp. 306 triliun. Ia meminta untuk setiap menteri dan kepala lembaga untuk melihat rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang telah diterapkan.

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Tempo.co ini mendefinisikan kalau Kementerian Kesehatan melakukan pemangkasan anggaran hingga 50%, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, sebagai respons terhadap Instruksi Presiden tentang efisiensi. Tempo.co menunjukkan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk menangani isu pengeluaran anggaran yang berlebihan serta mencari metode untuk mengelola anggaran dengan lebih efektif.

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Tempo.co adalah Pemangkasan dilakukan untuk menjalankan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025 tentang efisiensi belanja K/L sebesar Rp 306 triliun. menunjukkan bahwa keputusan untuk memotong anggaran bukanlah keputusan sepihak, melainkan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang lebih luas untuk efisiensi.

3. *Make Moral Judgment*

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Tempo.co menuliskan Pemotongan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan lainnya dianggap sebagai langkah yang tepat, yang di mana yang awalnya pejabat menggunakan kelas bisnis lalu di turunkan menjadi kelas ekonomi.

4. *Treatment Recommendation*

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Tempo.co menuliskan Presiden prabowo meminta efisiensi anggaran belanja 2025 sebesar Rp. 306 triliun. Ia meminta untuk setiap menteri dan kepala lembaga untuk melihat rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang telah diterapkan. Pemberitaan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari kebijakan jangka Panjang.

7. Analisis Media (Tempo.co)

g. Analisis Berita 7

Judul :Pemangkasan Anggaran, Kemenhub Pastikan Pertahankan Subsidi Transportasi Publik

Sumber :Tempo.co

Tanggal :Jumat, 14 Februari 2025

Ringkasan :Kementerian Perhubungan akan memusatkan perhatian pada anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp 17,725 triliun untuk meningkatkan layanan transportasi publik serta subsidi. Walaupun anggaran tersebut mengalami efisiensi sebesar 43,66%, Kemenhub tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang terjangkau. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi pengeluaran kementerian hingga Rp 306,69 triliun.

Tabel 4. 17 Analisis Artikel Berita 7 Tempo.co

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kementerian Perhubungan menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan layanan transportasi publik dengan anggaran yang terbatas. Anggaran yang terefisiensi sebesar 43,66 persen atau sekitar Rp. 13,72 triliun.
<i>Diagnouse Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Lewat beleid ini, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau selsuruh indoneisa.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Menteri Perhubungan menyampaikan pihaknya terus melakukan tinjauan <i>risk based analysis</i> atas anggaran pendaparan dan belanja 2025, setekah analisis tersebut ia akan melaksanakan menggunakan anggaran yang ada.

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Tempo.co ini mendefinisikan kalau Kementerian Perhubungan menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan layanan transportasi publik dengan anggaran yang terbatas. Anggaran yang terefisiensi sebesar 43,66 persen atau sekitar Rp. 13,72 triliun. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebutuhan mendesak untuk efisiensi, layanan publik tetap menjadi prioritas.

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Tempo.co adalah Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Lewat beleid ini, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun

3. *Make Moral Judgment*

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Tempo.co menuliskan Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau selsuruh indoneisa. Ini menciptakan citra positif bagi pemerintah, menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun dalam kondisi yang sulit.

4. *Treatment Recommendation*

Melihat dari elemen *treatmen recommendation*, Tempo.co menuliskan Menteri Perhubungan menyampaikan pihaknya terus melakukan tinjauan *risk based analysis* atas anggaran pendaparan dan belanja 2025, setekah analisis tersebut ia akan melaksanakan menggunakan anggaran yang ada. Hal ini memberi kesan bahwa pemotongan dilakukan secara terstruktur

8. Analisis Media (Tempo.co)

h. Analisis Berita 8

Judul :Kecelakaan Bus ALS, MTI: Efisiensi Anggaran Sebabkan Sistem Manajemen Keselamatan Terhenti

Sumber :Tempo.co

Tanggal :Jumat, 7 Februari 2025

Ringkasan :Wakil Ketua MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menanggapi kecelakaan bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang mengakibatkan 12 penumpang tewas. Ia menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan untuk sosialisasi keselamatan transportasi sebagai penyebab meningkatnya insiden kecelakaan.

Tabel 4. 18 Analisis Artikel Berita 18 Tempo.co

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kementerian Perhubungan merespon kecelakaan yang dihadapi oleh bus antar lintas Sumatera ini di padang panjang, menteri perhubungan mengatakan hal ini bisa terjadi akibat adanya efisiensi anggaran dalam sektor keselamatan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Efisiensi anggaran Kementerian Perhubungan, terutama pemangkasan dana sosialisasi dan program keselamatan transportasi, serta lemahnya pengawasan izin operasional.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Keselamatan transportasi sudah di tahap darurat. Tingkat kecelakaan tinggi, tingkat fasilitasnya pun juga harus tinggi. Sia-sia saja presiden mendorong generasi unggul kalau akhirnya meninggal di jalan karena kecelakaan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Salah satu bentuk keseriusan mengakhiri kecelakaan itu, dimulai dari penganggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan. Anggaran keselamatan jangan dikurangi, bila perlu ditambah, agar angka kecelakaan tidak meningkat terus.

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Tempo.co ini mendefinisikan kalau Kementerian Perhubungan merespon kecelakaan yang dihadapi oleh bus antar lintas Sumatera ini di padang panjang, menteri perhubungan mengatakan hal ini bisa terjadi akibat adanya efisiensi anggaran dalam sektor keselamatan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan transportasi di Indonesia berada dalam kondisi darurat

2. ***Diagnose Causes***

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang di tuliskan oleh Tempo.co adalah Efisiensi anggaran Kementerian Perhubungan, terutama pemangkasan dana sosialisasi dan program keselamatan transportasi, serta lemahnya pengawasan izin operasional. Kebijakan efisiensi yang diimplementasikan oleh pemerintah, terutama di Kementerian Perhubungan, telah mengurangi usaha untuk meningkatkan keselamatan, yang berkontribusi pada terjadinya insiden kecelakaan.

3. ***Make Moral Judgment***

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang di berikan oleh Tempo.co menuliskan Keselamatan transportasi sudah di tahap darurat. Tingkat kecelakaan tinggi, tingkat fasilitasnya pun juga harus tinggi. Sia-sia saja presiden mendorong generasi unggul kalau akhirnya meninggal di jalan karena kecelakaan. Tempo menuliskan seakan pemangkasan anggaran untuk keselamatan transportasi dianggap tidak etis dan berisiko bagi nyawa penumpang.

4. ***Treatment Recommendation***

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Tempo.co menuliskan Salah satu bentuk keseriusan mengakhiri kecelakaan itu, dimulai dari penganggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan. Anggaran keselamatan jangan dikurangi, bila perlu ditambah, agar angka kecelakaan tidak meningkat terus. Pemberitaan yang diberikan tempo.co ialah untuk menambah anggaran keselamatan transportasi dan memperbaiki program manajemen keselamatan menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk tindakan konkret

9. **Analisis Media (Tempo.co)**

i. **Analisis Berita 9**

Judul :Menag: Efisiensi Anggaran Berdampak pada Program Prioritas, Dari Haji hingga Dana Pendidikan

Sumber :Tempo.co

Tanggal :Senin, 3 Februari 2025

Ringkasan :Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada program prioritas Kementerian Agama, mengurangi anggaran dari Rp 78,59 triliun menjadi Rp 64,27 triliun.

Tabel 4. 19 Analisis Artikel Berita 19 Tempo.co

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Pemangkasan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp 14,28 triliun menyebabkan terganggunya pelaksanaan program-program Prioritas kementerian Agama.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Surat Menkeu S-37/MK.02/2025 atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pemangkasan anggaran dianggap berisiko bagi layanan keagamaan dan pendidikan yang vital bagi masyarakat.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Kemenag harus melakukan penyesuaian ulang agar efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap program strategis. Pemerintah didesak lebih selektif dalam pemotongan.

Rincian Analisis :

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Tempo.co ini mendefinisikan kalau Kementerian Agama melakukan Pemangkasan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp 14,28 triliun menyebabkan terganggunya pelaksanaan program-program Prioritas kementerian Agama. Dari adanya pengefisiensi tersebut kemenag mengalami dampak bagi layanan prioritas agama seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat dan pengembangan potensi ekonomi berbasis agama. Ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat mengganggu layanan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat

2. *Diagnose Causes*

Melihat dari elemen *diagnose cause*, pendefinisian dari masalah yang dituliskan oleh Tempo.co adalah Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Surat Menkeu S-37/MK.02/2025 atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.

3. ***Make Moral Judgment***

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang diberikan oleh Tempo.co menuliskan Pemangkasan anggaran dianggap berisiko bagi layanan keagamaan dan pendidikan yang vital bagi masyarakat. Tindakan ini dinilai tidak etis karena dapat mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan citra negatif terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat.

4. ***Treatment Recommendation***

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Tempo.co menuliskan Kemenag harus melakukan penyesuaian ulang agar efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap program strategis. Menteri Agama Nasarudin mengatakan

"Hal ini mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian kembali agar dapat memenuhi target efisiensi," ujar Nasaruddin (Tempo,2025)

Tempo.co menuliskan dalam pemberitaanya untuk menekankan pentingnya penyesuaian yang bijaksana dalam pengelolaan anggaran, agar program-program penting tetap dapat dilaksanakan meskipun dalam kondisi efisiensi.

10. **Analisis Media (Tempo.co)**

j. **Analisis Berita 10**

Judul :Anggaran Kementeriannya Dipangkas, Menag: Dulu Pendiri Bangsa Tanpa APBN Bisa Berbuat Banyak

Sumber :Tempo.co

Tanggal :Selasa, 4 Februari 2025

Ringkasan :Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada program prioritas kementeriannya, termasuk

layanan keagamaan dan pendidikan. Anggaran Kementerian Agama dipangkas dari Rp 78,59 triliun menjadi Rp 64,27 triliun. Nasaruddin berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencari alternatif solusi, meskipun identifikasi efisiensi baru mencapai Rp 7,28 triliun, memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk memenuhi target efisiensi.

Tabel 4. 20 Analisis Artikel Berita 20 Tempo.co

ELEMEN	HASIL
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Pemangkasan anggaran Kemenag sebesar Rp 14,28 triliun berdampak pada program prioritas di bidang layanan keagamaan dan pendidikan, termasuk ibadah haji, BOS, BOPTN, dll.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Surat Menkeu No. S-37/MK.02/2025, bertujuan sebagai langkah untuk menghemat belanja negara.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Walaupun anggaran mengalami pemotongan, Nasaruddin menegaskan bahwa ia akan mengambil tindakan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Nasaruddin menyarankan agar kementeriannya mencari jalan alternatif untuk tetap memberikan pelayanan meskipun anggaran berkurang.

Rincian Analisis :

1. ***Define Problem***

Melihat dari element *define problem*, berita yang di tulis oleh Tempo.co ini mendefinisikan kalau Pemangkasan anggaran Kemenag sebesar Rp 14,28 triliun berdampak pada program prioritas di bidang layanan keagamaan dan pendidikan, termasuk ibadah haji, BOS, BOPTN. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak langsung pada program-program yang penting bagi masyarakat.

2. ***Diagnose Causes***

Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Surat Menkeu No. S-37/MK.02/2025, bertujuan sebagai langkah untuk menghemat belanja negara. Ini mengindikasikan bahwa keputusan politik dapat mempengaruhi sektor publik dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. ***Make Moral Judgment***

Melihat dari elemen *make moral judgment*, dalam pemberitaan yang diberikan oleh Tempo.co menuliskan Walaupun anggaran mengalami pemotongan, Nasaruddin menegaskan bahwa ia akan mengambil tindakan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Tempo.co menuliskan Ini sebagai cerminan nilai-nilai ketahanan dan tanggung jawab dalam menghadapi tantangan, serta mengajak semua pihak untuk beradaptasi.

4. ***Treatment Recommendation***

Melihat dari elemen *treatment recommendation*, Tempo.co menuliskan Nasaruddin menyarankan agar kementeriannya mencari jalan alternatif untuk tetap memberikan pelayanan meskipun anggaran berkurang. Pemberitaan ini menggambarkan kalau Kementerian agama akan terus berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.3 **Perbandingan Analisis Framing**

Selanjutnya, peneliti akan membahas perbandingan atau komparasi pembingkai pemberitaan mengenai pemberitaan Lima Kementerian Republik Indonesia dengan Efisiensi Anggaran terbesar di dua media berita nasional, yaitu Kompas.com dan Tempo.co. Komparasi yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua media tersebut membingkai masalah yang sedang dihadapi oleh Lima Kementerian tersebut terhadap efisiensi anggaran yang mereka alami. Kementerian tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama. Peneliti ingin mengidentifikasi perbedaan pendekatan naratif dan perspektif pemberitaan yang ingin disampaikan oleh kedua media kepada publik. Analisis framing ini dilakukan dengan menggunakan model analisis framing dari Robert. N. Entman yang di mana dalam model tersebut terdapat empat elemen, elemen tersebut adalah *Define Problem*, *Diagnose Cause*, *Make Moral Judgment* dan *Treatment Recommendation*.

Alasan peneliti menggunakan model analisis *Framing Robert N. Entman* didalam penelitian ini adalah karena pendekatan tersebut mampu memperlihatkan unsur naratif dalam suatu pemberitaan yang ingin di teliti. Dalam konteks penelitian ini, framing difokuskan pada isu efisiensi anggaran APBN yang di mana peneliti mengambil topik efisiensi anggran pada Lima Kementerian dengan pemotongan paling besar dan persepsi terhadap pandangan publik. Maka dari itu dengan menggunakan konsep framing Robebtr N. Entman kita dapat membantu pembaca agar lebih kritis terhadap cara media memberikan pandangan lain serta penilaian kita tentang kebijakan pemerintah. Dengan peneliti menggunakan teknik framing, media memiliki kemampuan untuk mengubah pandangan publik dan cara masyarakat memahami realitas yang ada.

Tabel 4. 21 Komparasi Berita Kompas.com dan Tempo.co

Perangkat Framing	Kompas.com	Tempo.co
<i>Define Problem</i>	Kompas.com membingkai isu pemberitaan mengenai efisiensi anggaran terhadap Lima Kementerian, secara keseluruhan Kompas.com mendefinisikan Lima Kementerian mendapatkan pemotongan anggaran yang tertulis dengan sangat lengkap.	Tempo.co membingkai isu pemberitaan ini sebagai penghambatan dalam pelaksanaan program – program penting. Tempo dalam penulisanya menjelaskan dampak apa saja yang di terima oleh para kementerian.
<i>Diagnose Cause</i>	Kompas.com menjelaskan semua penyebab masalah dari pemberitaanya berasal dari Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 dan Kementerian Keuangan untuk melakukan efisiensi anggaran	Tempo.co melihat bahwa latar belakang dari permasalahan ini berasal dari Presiden Prabowo Subianto dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan.
<i>Make Moral Judgment</i>	Kompas.com menuliskan para pejabat kementerian menunjukan dukunganya terhadap kebijakan efisiensi anggaran, meski adapun kekhawatiran mengenai dampak kualitas layanan.	Tempo.co menjelaskan bahwa para kementerian harus menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan walaupun dalam kondisis anggaran yang terbatas.

<i>Treatment Recommendation</i>	Kompas.com memberikan penyelesaian masalah dengan memberikan rekomendasi untuk memangkas anggaran di pos – pos yang tidak terlalu mendesak.	cenderung Tempoco memberikan penyelesaian masalah dengan mendorong dialog dan kolaborasi antar kementerian untuk mencari solusi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran.
---------------------------------	---	---

Dalam elemen *Define Problem*, menggambarkan bagaimana interpretasi dan definisi masalah yang beragam dari pemberitaan Efisiensi Anggaran pada Lima Kementerian Republik Indonesia. Kompas.com menggambarkan Kementerian yang terdampak fenomena Efisiensi Anggaran anggaran cenderung lebih menerima perintah yang diberikan oleh Instruksi Presiden dan Surat Kementerian Keuangan. Dari sudut pandang Kompas.com pemberitaan efisiensi anggaran ini menjadi kewajiban yang harus di jalani bagi setiap Kementerian, di dalam pemberitaannya Kompas.com lebih menjelaskan dengan detail terkait nominal anggaran yang terpaksa bagi setiap Kementerian. Berbeda dengan Kompas.com, Tempo.co menggambarkan pemberitaan Efisiensi Anggaran ini sebagai dampak apa saja yang diterima oleh para kementerian dan siapa saja yang terkena, dan efisiensi anggaran ini sebagai penghambatan yang di berikan kepada kementerian untuk melakukan pekerjaannya.

Hal ini dapat dilihat dari berita yang diambil oleh peneliti dalam bagian analisis media, yang membahas mengenai pemberitaan efisiensi anggaran sebagai kewajiban untuk menaati instruksi dari pemerintahan, fokus utama dari pemberitaan yang di tuliskan oleh Kompas.com adalah memberikan penulisan data Kementerian mendapatkan pemangkasan anggaran yang sangat signifikan. Sementara Tempo.co fokus pada bagaimana perintah efisiensi anggaran ini sebagai hambatan dan beresiko mengganggu kinerja yang di jalani oleh para Kementerian Republik Indonesia meskipun isi dari pemberitaannya sama membahas tentang pemangkasan yang signifikan.

Dalam elemen *Diagnose Cause*, terdapat persamaan dari pemberitaan yang di berikan. Kompas.com menuliskan masalah awal yang di terima oleh para Kementerian Republik Indonesia ini berawal dari perintah yang di berikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 serta

dilanjutkan dengan Surat yang di berikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nomor S-37/MK.02/2025 langkah ini diambil untuk mengatasi masalah pemborosan dan memastikan alokasi dana lebih tepat sasaran, meskipun ada kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap layanan publik dalam penulisan Kompas.com mereka menuliskan penyebab masalahnya hanya dari Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan. Tempo juga membahas penyebab dari adanya efisiensi anggaran tersebut bersumber dari perintah yang sama yaitu Penyebab efisiensi anggaran berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto terletak pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang memerintahkan pemangkasan anggaran secara signifikan hingga Rp 306,69 triliun, namun dalam penulisan yang di berikan oleh tempo.co mereka lebih menonjolkan sosok "Prabowo Subianto" dalam penyebab adanya masalah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan APBN, namun berdampak pada pengurangan anggaran di berbagai kementerian, yang berpotensi mengganggu layanan publik.

Dalam elemen *Make Moral Judgment*, Kompas.com menggambarkan keputusan pemerintah dalam menaati perintah yang diberikan adalah langkah yang tepat, Kementerian cenderung menerima semua perintah yang di berikan oleh dan dengan adanya efisiensi anggaran ini tetapi dengan patuhnya kementerian terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang baru ini, mereka mengkhawatirkan jika dengan adanya hal tersebut membuat layanan yang di berikan kepada masyarakat tidak akan sesuai. Lalu Tempo.co memberikan penilaian kalau Kementerian di haruskan untuk menjaga kualitas dari kinerja setiap kementeriannya walaupun anggaran yang di punyai tidak mencukupi.

Kemudian dalam elemen *Treatment Recommendation*, Kompas.com cenderung merekomendasikan penanganan, berbagai kementerian di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Pemberitaan dari Kompas.com menekankan pentingnya pemangkasan anggaran yang selektif, di mana kementerian disarankan untuk memprioritaskan pos-pos yang tidak mendesak dan memastikan bahwa belanja pegawai serta bantuan sosial tetap terjaga. Sementara itu Tempo.co menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi antar kementerian untuk merumuskan strategi yang efektif, sehingga meskipun efisiensi anggaran

diperlukan, keberlanjutan program-program vital tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Secara keseluruhan, analisis Framing antara Kompas.com dan Tempo.co mengungkapkan kalau kedua media tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda terkait merespon fenomena pemberitaan yang sama. Jika hasil analisis ini dikaitkan dengan Teori dan Konsep, bagian *Define Problem* bisa dikaitkan dengan berita ekonomi, di mana berita ekonomi itu menyajikan informasi krusial tentang perkembangan ekonomi di suatu negara. Masyarakat perlu mengikuti berita terbaru untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang dunia perekonomian (Abrar, 2017). Di mana Kompas.com menyajikan *Define Problem* dengan penulisan angka pemangkasan efisiensi anggaran, di mana dengan tingginya angka pemangkasan berarti ada masalah dalam keuangan negara. Untuk Tempo.co sendiri dalam berita ekonomi yang mereka sajikan tertutup dengan pemberitaan dampak yang dialami oleh para kementerian akibat dari efisiensi anggaran 2025 tersebut.

Lalu untuk kaitan Teori dan Konsep bagian Elemen *Diagnose Cause* berhubungan dengan siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab dari masalah yang dilaporkan. Baik Kompas.com maupun Tempo.co menyebut Instruksi Presiden dan Menteri Keuangan sebagai sumber dari pemangkasan anggaran, namun Tempo lebih menekankan sosok Presiden Prabowo sebagai penggerak utama kebijakan. Hal ini sangat terkait dengan konsep konstruksi realitas media, di mana media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menyusun dan menginterpretasikan informasi berdasarkan nilai, kepentingan, dan sudut pandang tertentu. Melalui konstruksi ini, media membentuk persepsi masyarakat mengenai siapa yang bertanggung jawab atas suatu isu dalam hal ini, kebijakan efisiensi anggaran yang dapat dilihat sebagai solusi atau justru sebagai penghalang.

Elemen *Make Moral Judgment* menunjukkan bagaimana media memberikan penilaian moral terhadap tindakan atau kebijakan tertentu. Kompas.com menggambarkan kementerian sebagai pihak yang taat dan patuh terhadap kebijakan efisiensi, sementara Tempo.co lebih menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan meskipun dana terbatas. Penilaian ini sejalan dengan fungsi media sebagai *watchdog*, yaitu mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah serta menilai apakah tindakan tersebut pantas, adil, dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks ini, media berperan sebagai pengontrol sosial

yang tidak hanya memberitakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar mencerminkan keadilan dan akuntabilitas.

Elemen *Treatment Recommendation* menjelaskan solusi atau tindakan yang disarankan oleh media terkait isu yang diangkat. Kompas.com merekomendasikan efisiensi anggaran yang selektif, sementara Tempo.co mendorong dialog antar kementerian. Hal ini sangat terkait dengan konsep jurnalisme online, yang memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi dengan cepat, interaktif, dan komprehensif. Dengan memanfaatkan kemampuan multimedia dan ruang yang tidak terbatas, media online dapat menyajikan berbagai alternatif solusi serta memperluas partisipasi publik dalam diskusi kebijakan. Informasi yang disajikan secara digital juga memudahkan pembaca untuk memahami pilihan solusi yang ditawarkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.